

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA PANTAI HAMBAWANG TIMUR KECAMATAN LABUAN AMAS SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Siti Rahmaniah¹, Sugianor², M. Husaini³
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: rahmaniahbrb123@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menyebabkan volume sampah rumah tangga di wilayah perdesaan turut bertambah, sementara tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk, tingkat, serta faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih bersifat pasif dan terbatas pada aktivitas pembuangan sampah, dengan perilaku membakar, menimbun, serta tidak melakukan pemilahan sampah. Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat meliputi tingkat pengetahuan, kesadaran lingkungan, kebiasaan masyarakat, serta dukungan dan keterlibatan pemerintah desa. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat yang mengintegrasikan penyediaan sarana dan prasarana, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan Sampah; Perilaku Lingkungan; Desa; Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

Population growth has led to an increase in the volume of household waste in rural areas, while community participation in waste management remains relatively low. This study aims to describe the forms, levels, and factors influencing community participation in waste management in Pantai Hambawang Timur Village, Labuan Amas Selatan District, Hulu Sungai Tengah Regency. This research employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. The results show that community participation in waste management is still passive and limited to waste disposal activities, characterized by behaviors such as burning, burying, and the absence of waste segregation. Factors influencing community participation include the level of knowledge, environmental awareness, community habits, as well as support and involvement from the village government. This study emphasizes the importance of a community-based participatory approach that integrates the provision of facilities and infrastructure, environmental education, and community empowerment to achieve sustainable waste management.

Keywords: *Community Participation; Waste Management; Environmental Behavior; Village; Community Empowerment.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat seiring dengan berkembangnya aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat berimplikasi langsung terhadap meningkatnya volume dan jenis sampah yang dihasilkan, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Perubahan pola konsumsi

masyarakat yang semakin kompleks turut memperbesar permasalahan sampah, terutama sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari. Sampah yang tidak dikelola secara baik dan berkelanjutan tidak hanya menimbulkan permasalahan estetika lingkungan, tetapi juga berdampak serius terhadap pencemaran tanah, air, dan udara. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas lingkungan hidup serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan masyarakat, seperti penyakit berbasis lingkungan dan menurunnya kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan aspek lingkungan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Sampah yang dikelola dengan baik tidak hanya dapat mengurangi beban pencemaran lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan kembali dan daur ulang. Oleh karena itu, pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Masyarakat sebagai penghasil utama sampah memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan sampah, terutama pada tahap awal pengelolaan dari sumbernya.

Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pengelolaan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Dalam konteks tersebut, peran masyarakat tidak hanya sebatas sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat secara langsung dalam setiap tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan timbulan sampah, pemilahan, pengumpulan, hingga pemanfaatan kembali. Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan masyarakat dalam menerapkan perilaku pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya kesadaran lingkungan, kurangnya pemahaman mengenai dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan, serta kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya masih sering dijumpai di berbagai daerah. Selain itu, praktik tidak melakukan pemilahan sampah serta kebiasaan membakar atau menimbun sampah di sekitar tempat tinggal masih menjadi pilihan masyarakat karena dianggap praktis dan mudah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan sampah apabila tidak diiringi dengan upaya peningkatan partisipasi dan perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Permasalahan serupa juga terjadi di Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas

Lingkungan Hidup dan Perhubungan telah menyediakan Tempat Penampungan Sementara sebagai salah satu fasilitas pendukung pengelolaan sampah, pemanfaatannya belum berjalan secara optimal. Hasil pengamatan awal menunjukkan masih adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah di luar TPS, tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan ketentuan, serta memilih cara membakar atau menimbun sampah di sekitar lingkungan tempat tinggal. Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat menjadi sumber pencemaran dan sarang penyakit, serta mengganggu kenyamanan dan keindahan lingkungan desa. Selain itu, kondisi ini juga menunjukkan perlunya pendekatan pengelolaan sampah yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya pada penyediaan fasilitas fisik semata. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Pemahaman yang komprehensif mengenai partisipasi masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dapat dikembangkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang lebih efektif, partisipatif, dan berkelanjutan, khususnya di wilayah perdesaan yang memiliki karakteristik sosial dan lingkungan yang khas.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual dan holistik, terutama terkait perilaku, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna dan pengalaman yang dirasakan langsung oleh masyarakat serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Pantai Hambawang Timur dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut masih menghadapi permasalahan pengelolaan sampah dan menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, meskipun pemerintah daerah telah menyediakan fasilitas pendukung berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS). Kondisi tersebut menjadikan desa ini relevan sebagai

lokasi penelitian untuk mengkaji kesenjangan antara ketersediaan fasilitas dan tingkat keterlibatan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2025 dengan memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu aparat pemerintah desa, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, serta masyarakat Desa Pantai Hambawang Timur yang terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan sampah. Pemilihan informan secara purposive dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar relevan dan sesuai dengan fokus penelitian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan instansi terkait, serta berbagai literatur ilmiah yang mendukung dan memperkuat analisis penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan, ketersediaan sarana pengelolaan sampah, serta perilaku masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali informasi yang lebih mendalam mengenai bentuk partisipasi masyarakat, tingkat kesadaran lingkungan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, arsip, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di lokasi penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi, dikategorikan, dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian untuk memudahkan proses analisis. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis sehingga dapat menggambarkan kondisi partisipasi masyarakat secara jelas. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola, kecenderungan, dan temuan penting yang muncul dari hasil analisis data. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik dengan cara membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan. Penerapan triangulasi ini bertujuan untuk meminimalkan bias dan meningkatkan kredibilitas data, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, terutama di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan sumber daya

dan infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Pantai Hambawang Timur masih berada pada tingkat yang relatif rendah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah umumnya hanya terbatas pada aktivitas membuang sampah, tanpa disertai dengan upaya lanjutan seperti pemilahan, pengurangan, atau pemanfaatan kembali sampah rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat pasif dan belum berkembang ke arah partisipasi aktif yang melibatkan kesadaran, inisiatif, serta tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan.

Rendahnya partisipasi tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah belum sepenuhnya dipahami sebagai persoalan bersama yang memerlukan kontribusi semua pihak. Masyarakat cenderung memandang sampah sebagai limbah yang harus segera disingkirkan, bukan sebagai masalah lingkungan yang memerlukan pengelolaan jangka panjang. Pandangan ini menyebabkan keterlibatan masyarakat hanya berhenti pada tahap akhir, yaitu pembuangan, tanpa adanya upaya pencegahan dari sumber sampah itu sendiri. Padahal, pengelolaan sampah yang efektif menuntut keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi.

rendahnya partisipasi masyarakat juga tercermin dari minimnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan sampah di tingkat desa. Masyarakat cenderung menunggu kebijakan dan instruksi dari pemerintah desa tanpa adanya inisiatif untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, atau solusi alternatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pemerintah desa. Akibatnya, fasilitas dan program yang telah disediakan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat, sehingga pemanfaatannya menjadi kurang optimal dan keberlanjutan pengelolaan sampah sulit diwujudkan.

Situasi tersebut mengindikasikan bahwa proses perencanaan program belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara partisipatif sejak tahap awal. Ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam identifikasi masalah dan perumusan solusi, maka rasa memiliki terhadap program menjadi rendah. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme musyawarah dan forum diskusi yang lebih inklusif agar masyarakat dapat berkontribusi secara aktif serta merasa menjadi bagian dari upaya pengelolaan sampah di desa.

Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Perilaku masyarakat terhadap sampah merupakan refleksi langsung dari tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian lingkungan yang dimiliki. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara, masih banyak masyarakat yang belum menerapkan perilaku pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Tempat Penampungan Sementara telah

disediakan oleh pemerintah desa sebagai sarana pendukung pengelolaan sampah, sebagian masyarakat masih membuang sampah di sembarang tempat atau memilih cara praktis seperti membakar dan menimbun sampah di sekitar rumah. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas belum sepenuhnya diiringi dengan perubahan perilaku dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab.

Perilaku membakar sampah umumnya dilakukan karena dianggap sebagai solusi tercepat dan paling mudah dalam mengatasi penumpukan sampah rumah tangga. Praktik ini sering kali dipilih karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan, serta adanya anggapan bahwa pembakaran sampah dapat menghilangkan sampah tanpa menimbulkan masalah lanjutan. Namun, perilaku tersebut justru menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran udara, gangguan kesehatan pernapasan, serta menurunnya kualitas lingkungan. Dampak tersebut sering kali tidak disadari secara langsung oleh masyarakat karena bersifat jangka panjang dan kumulatif, sehingga risiko yang ditimbulkan cenderung diabaikan.

Selain membakar sampah, kebiasaan menimbun sampah di pekarangan atau lahan kosong juga masih banyak dilakukan. Praktik ini berpotensi mencemari tanah dan air tanah akibat zat-zat berbahaya yang terkandung dalam sampah, serta dapat menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit seperti lalat dan tikus. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami konsekuensi ekologis dan kesehatan dari perilaku pengelolaan sampah yang tidak tepat. Rendahnya pemahaman tersebut turut memengaruhi sikap masyarakat yang cenderung menganggap sampah sebagai persoalan sepele yang tidak memerlukan penanganan khusus.

Tidak dilakukannya pemilahan sampah antara sampah organik dan anorganik juga menjadi indikator rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep pengelolaan sampah dari sumbernya. Padahal, pemilahan sampah merupakan langkah awal yang sangat penting dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan, karena dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS serta membuka peluang pemanfaatan sampah, seperti pengomposan dan daur ulang. Ketidakteraturan dalam membuang sampah serta rendahnya kepatuhan terhadap aturan yang ada mencerminkan lemahnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat. Perilaku yang tidak ramah lingkungan cenderung dibiarkan dan dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga upaya untuk menciptakan perubahan perilaku secara kolektif menghadapi berbagai tantangan dan memerlukan pendekatan yang lebih persuasif dan berkelanjutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran individu belum berkembang menjadi kesadaran bersama yang terinternalisasi dalam norma sosial masyarakat. Ketika perilaku membuang sampah sembarangan tidak mendapatkan teguran atau sanksi sosial, maka tindakan tersebut perlahan dianggap wajar dan terus berulang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nilai-nilai kepedulian lingkungan melalui edukasi yang berkelanjutan serta pembentukan budaya disiplin lingkungan agar

perubahan perilaku tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Peran Pemerintah Desa dan Instansi Terkait

Pemerintah desa dan instansi terkait memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk perilaku masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menunjukkan komitmen awal melalui penyediaan fasilitas pengelolaan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara. Upaya ini merupakan langkah penting sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana pendukung pengelolaan lingkungan. Namun demikian, penyediaan sarana fisik tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan program pendukung yang berkelanjutan.

Keterbatasan dalam kegiatan sosialisasi menyebabkan masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesehatan. Sosialisasi yang dilakukan masih bersifat sporadis dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan belum mampu membentuk kesadaran kolektif. Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap perilaku masyarakat dalam membuang sampah membuat aturan yang ada tidak memiliki kekuatan untuk mendorong perubahan perilaku. Tanpa adanya sanksi yang jelas dan konsisten, masyarakat cenderung mengabaikan aturan dan kembali pada kebiasaan lama.

Peran pemerintah desa seharusnya tidak hanya terbatas pada penyediaan sarana, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan partisipatif. Pelibatan tokoh masyarakat, ketua RT, dan kelompok-kelompok sosial dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan efektivitas program dan menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Dengan adanya keterlibatan berbagai elemen masyarakat, pengelolaan sampah dapat berkembang menjadi gerakan bersama yang didorong oleh kesadaran kolektif, bukan sekadar kewajiban administratif.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor pengetahuan menjadi faktor mendasar yang memengaruhi perilaku masyarakat. Rendahnya pemahaman mengenai jenis sampah, dampak pencemaran lingkungan, dan manfaat pengelolaan sampah yang baik menyebabkan masyarakat tidak memiliki motivasi yang kuat untuk berpartisipasi secara aktif. Pengetahuan yang terbatas ini juga berkontribusi pada munculnya persepsi bahwa sampah bukanlah persoalan serius yang memerlukan perhatian khusus. Akibatnya, masyarakat cenderung memprioritaskan

penyelesaian masalah secara praktis tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Faktor kesadaran lingkungan juga berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Rendahnya kesadaran menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan kenyamanan pribadi dibandingkan kepentingan lingkungan jangka panjang. Selain itu, faktor kebiasaan yang telah berlangsung lama menjadi hambatan utama dalam mengubah perilaku masyarakat. Praktik membakar dan menimbun sampah telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, sehingga memerlukan upaya edukasi yang konsisten dan berkelanjutan untuk mengubah pola pikir dan perilaku tersebut. Perubahan perilaku tidak dapat terjadi secara instan, melainkan membutuhkan proses internalisasi nilai-nilai kepedulian lingkungan yang dilakukan secara terus-menerus.

Faktor eksternal, seperti dukungan pemerintah dan ketersediaan program pemberdayaan masyarakat, turut memengaruhi tingkat partisipasi. Kurangnya pendampingan serta minimnya pelibatan masyarakat dalam program pengelolaan sampah menyebabkan masyarakat merasa tidak memiliki peran yang signifikan. Kondisi ini dapat menimbulkan sikap pasif dan ketergantungan terhadap pemerintah desa dalam menangani persoalan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan intervensi yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan dari berbagai pihak, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Implikasi Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di tingkat desa. Pengelolaan sampah yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan struktural melalui penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga memerlukan pendekatan kultural yang berfokus pada perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran masyarakat. Partisipasi masyarakat harus dipahami sebagai keterlibatan aktif yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui program edukasi lingkungan yang berkelanjutan dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong, pelatihan pengelolaan sampah, serta pembentukan kelompok peduli lingkungan dapat menjadi strategi yang efektif untuk menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur diharapkan tidak hanya mampu mengurangi permasalahan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan sampah berbasis

partisipasi masyarakat berpotensi menjadi model pengelolaan lingkungan yang adaptif dan berkelanjutan, serta dapat diterapkan di wilayah perdesaan lain yang memiliki karakteristik sosial dan lingkungan yang serupa. Selain itu, keberhasilan model ini dapat memperkuat kemandirian desa dalam mengelola persoalan lingkungan secara kolektif dan berkesinambungan. Hal ini juga dapat mendorong terbentuknya budaya peduli lingkungan yang tertanam dalam kehidupan sosial masyarakat secara jangka panjang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Pantai Hambawang Timur masih tergolong rendah. Keterlibatan masyarakat umumnya hanya terbatas pada pembuangan sampah, sedangkan upaya pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan kembali sampah hampir tidak dilakukan, sehingga partisipasi masyarakat lebih bersifat pasif dan belum berkembang menjadi partisipasi aktif yang melibatkan kesadaran, inisiatif, dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah juga belum ramah lingkungan, ditunjukkan dengan praktik membakar, menimbun, dan tidak melakukan pemilahan sampah, yang dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan, kesadaran lingkungan, serta kebiasaan lama. Pemerintah desa telah menyediakan fasilitas berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS), namun sosialisasi, pengawasan, dan program pemberdayaan masyarakat masih terbatas, sehingga fasilitas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti pengetahuan, kesadaran, dan kebiasaan, serta faktor eksternal, yaitu dukungan pemerintah dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan integrasi antara penyediaan sarana dan prasarana dengan pendekatan kultural yang menekankan perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran masyarakat. Upaya peningkatan partisipasi dapat dilakukan melalui edukasi lingkungan, pelibatan dalam kegiatan gotong royong, pelatihan pengelolaan sampah, dan pembentukan kelompok peduli lingkungan. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, pengelolaan sampah berbasis masyarakat berpotensi meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, serta dapat menjadi model pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan bagi wilayah perdesaan lain dengan karakteristik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Anonim. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Murdiyanto, E. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press



Subandi, M.M. 2022. *Pengelolaan Partisipasi Masyarakat Di Sekolah*. cetakan Pertama. Surabaya: Pustaka Media Guru